

**REKONSTRUKSI MODEL LEMBAGA KEUANGAN  
UNTUK USAHA TANI KECIL  
(Studi Kasus Lembaga Keuangan di Pedesaan Sumatera Barat)**

Oleh

**YULIZAR KASIH  
02301015**

**Disertasi Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Doktor pada  
Program Pascasarjana Universitas Andalas  
Program Studi Ilmu-Ilmu Pertanian  
Pemusatan Pembangunan Pertanian**



**PROGRAM STUDI PEMBANGUNAN PERTANIAN  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2008**

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui factor-faktor penyebab lembaga keuangan informal/kelompok swadaya masyarakat (LKI/KSM) dapat eksis dan berperan untuk usaha tani kecil (UTK) di daerah penelitian, dan elemen dasar serta rumusan konstruksi model lembaga keuangan yang efektif untuk UTK. Tujuan penelitian dijawab dengan pendekatan analisis multi kasus meliputi lembaga keuangan formal/LKF (PT. BPR X Koto Singkarak, BPR Tanjung Barulak dan KUD Sumani), semi formal/LKSF (UED-SP Sinar Tanjung dan UED-SP Beringin Jaya), informal/LKI/KSM (Kel. Kongsi Sepakat, BMT Masjid Raya, KTSP Ujung Tanjung), di Kabupaten Tanah Datar (Kecamatan Batipuh dan Pariangan) dan Kabupaten Solok (Kecamatan X Koto Singkarak dan Kubung), serta LKSF-Proyek Grameen Bank (GB). Data dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif dan kuantitatif dengan kerangka analisis rekonstruksi meliputi analisis dekonstruksi dan sintesis (Martius, 2004).

Dari hasil analisis penelitian disimpulkan bahwa kesesuaian karakteristik lembaga dengan sifat dan dinamika UTK, efektivitas pelayanan kredit, dan kemampuan mobilisasi modal internal dalam bentuk modal kolektif dan ziswah (zakat, infaq, shodaqoh, wakaf, dan hibah) merupakan faktor-faktor penyebab efektivitas peranan LKI/KSM melayani UTK di daerah penelitian. Efektivitas peranan LKI/KSM sangat ditentukan oleh peranan modal sosial dan nilai-nilai agama yang melandasi kegiatan lembaga, terutama pendirian lembaga, pelayanan kredit, dan mobilisasi modal internal. Kemudian dari hasil analisis disimpulkan pula bahwa elemen-elemen dasar lembaga keuangan yang efektif untuk UTK di pedesaan meliputi orientasi pendirian lembaga yang berpihak pada kepentingan UTK, kesesuaian karakteristik lembaga dengan sifat dan dinamika UTK, efektivitas pelayanan kredit, dan kemampuan mobilisasi modal internal.

Berdasarkan elemen-elemen dasar tersebut, maka model lembaga keuangan yang efektif untuk UTK di pedesaan idealnya berdasarkan pada prinsip keberpihakan pada kepentingan UTK dalam bentuk kesesuaian karakteristik lembaga dengan sifat dan dinamika UTK dan efektivitas pelayanan kredit, dan prinsip kemandirian dan keberlanjutan lembaga melalui memobilisasi modal internal.

*Kata Kunci : Lembaga Keuangan, Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), Mobilisasi Modal, Modal Sosial dan Nilai-Nilai Agama.*

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pembangunan pertanian bertujuan untuk meningkatkan produksi serta meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan hidup petani serta keluarganya. Untuk mencapai tujuan ini dibutuhkan modal sebagai faktor pelancar (Mosher, 1964). Modal dalam usaha tani secara umum dapat dibedakan kedalam dua kelompok yaitu modal milik sendiri (*equity capital*) dan modal pinjaman dari pihak lain, yang lazim disebut kredit (Daniel, 2002; Riyanto, 1986).

Pada dasarnya kredit sangat dibutuhkan dalam usaha tani, khususnya usaha tani kecil (UTK) di pedesaan. Hal ini merupakan hal yang wajar, karena pada umumnya UTK memiliki karakteristik yang hampir sama, seperti menghasilkan pendapatan yang rendah, memiliki lahan usaha yang sempit ( $< 0,5$  ha) dan selalu kekurangan modal (Sokartawi, 1986). Kredit yang sangat dibutuhkan tersebut digunakan untuk berbagai tujuan, diantaranya untuk membantu petani membeli bahan-bahan dan alat-alat pertanian yang produktif (Mosher, 1964), sehingga dapat menerapkan teknologi baru guna meningkatkan produksi (Hayami & Ruttan, 1971 ; Ali Khan, 1981). Disamping itu kredit juga digunakan oleh petani untuk kepentingan lain, seperti untuk perluasan usaha ( Daniel, 2002; Suyatno dkk, 1990) serta membiayai kebutuhan konsumsi dan biaya keluarga (Raeburn, 1984; Efferson, 1953; Wise & Brannen, 1982). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa peranan kredit dalam usaha tani, terutama UTK, sangatlah penting.

Kredit sangat dibutuhkan dan berperan penting bagi UTK di pedesaan, namun di sisi lain sulit mendapatkan kredit, dengan cara yang mudah dan murah. Persoalan ini berkaitan erat dengan adanya kondisi dualisme di pasar uang pedesaan (*rural finance market*) yakni antara lembaga keuangan formal (LKF) dan lembaga keuangan informal (LKI) (Ross McLeod dalam Kuncoro, 1987). Kondisi dualisme ini menyebabkan LKF dalam aktivitasnya sulit diakses oleh petani kecil dan cenderung melayani petani-petani menengah dan besar (Mubyarto, 1990; Kartasasmita, 1986; Braverman, 1993). Sementara LKI (pelepas uang, tengkulak, tukang ijon, dan lain-lain) lebih mudah diakses, tetapi lebih banyak bersifat eksploitatif<sup>1</sup> terhadap usaha dan kehidupan petani (Sugianto, 1994; Mubyarto, 1990; Ahmad, 1991; Meyer & Nagarajan, 2000; Smeru, 2000). Hal ini mengindikasikan bahwa selama ini LKF dan LKI belum mampu secara efektif melayani kebutuhan kredit UTK di pedesaan.

Fenomena di atas sangat berkaitan dengan proses kemiskinan petani kecil di pedesaan. Dalam kaitan ini Mubyarto (1990) untuk kasus Indonesia dan Subarto (1991) untuk kasus Bangladesh menyatakan bahwa fasilitas kredit mudah dan murah di pedesaan seolah-olah bukan ditujukan untuk petani kecil sebagai target utama, tetapi lebih banyak dinikmati oleh petani besar yang justru bermodal kuat. Sedangkan Ancok (1980) untuk kasus Indonesia, Chambers (1989), Alexandratos (1994), dan Vega (1984) untuk kasus negara kurang berkembang,

<sup>1</sup> Sifat eksploitatif LKI pada umumnya dalam bentuk tingkat bunga pinjaman yang sangat tinggi, bisa mencapai lebih 40% per bulan, dan keharusan petani menjual hasil panen kepada pihak yang meminjamkan kredit, sehingga terpelekas dalam hutang yang sulit terbayar (Mubyarto, 1990; Sugianto, 1994; Smeru, 2000; Supadi dan Mat Syukur, 2004).

Disamping itu terdapat beberapa LKI yang tidak bersifat eksploitatif, seperti SHG di Nepal (Acharya et al, 1992) dan *Prastan* (Dumontet, 1992), dan KSM : Julo-Julo dan Kelompok Kongsi di Sumatera Barat (Nuwirman, 1998 dan Zakri, 2001), namun peranannya tidak begitu dominan.

menyoroti belum berfungsinya lembaga keuangan (LKF) di pedesaan sebagai salah satu penyebab kemiskinan yang dialami petani kecil di pedesaan. Salah satu cara untuk memecahkan tersebut adalah dengan memberdayakan petani kecil dengan memberikan kesempatan akses yang luas terhadap sumber modal/fasilitas kredit (Kartasmita, 1996; Firdausy, 1997; Sumodiningrat, 2001). Sehingga peranan lembaga keuangan menjadi penting dalam memecahkan persoalan kemiskinan di pedesaan (Islam, 1990; Ahmad, 1998; Ancok, 1980).

Upaya pemerintah dalam mengatasi persoalan permodalan, terutama yang dialami petani kecil di pedesaan, meliputi pemberian fasilitas kredit yang murah bagi petani kecil maupun upaya pengembangan lembaga keuangan yang ada di pedesaan. Kebijakan pemberian fasilitas kredit yang murah untuk UTK oleh pemerintah melalui LKF dimulai dari kredit BIMAS (1970/71 – 1983/84) dan kemudian dilanjutkan dengan program kredit usaha tani (KUT) pada tahun 1984/85 (Daniel, 2002 ; Subagio. dkk, 2001; Pattern & Rosengard, 1991). Sedangkan setelah pelaksanaan KUT mengalami kemacetan, program kredit dilanjutkan dengan nama yang beragam untuk setiap daerah, misalnya kredit ketahanan pangan (KKP) dan kredit bantuan langsung.

Pemberian fasilitas kredit murah di atas kenyataannya belum efektif dalam melayani kebutuhan modal petani kecil sebagai sasaran utama, terutama untuk kasus BIMAS dan KUT yang sangat menonjol (Daniel, 2002; Robinson, 2002; Pattern & Rosengard, 1991). Secara umum kegagalan kedua program pemerintah ini lebih banyak disebabkan oleh kelemahan pihak lembaga penyalur kredit, baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan kredit di lapangan

(Robinson, 2002), sehingga dari jumlah kredit yang disalurkan banyak yang tidak dapat dikembalikan atau macet (Daniel, 2002).

Sebagai gambaran terlihat bahwa sejak tahun 1976/1977 realisasi penyaluran kredit Bimas di Indonesia mulai mengalami penurunan dengan tunggakan sebesar 18,15% dari total kredit Rp. 66.406.426.000 yang berhasil disalurkan. Setelah tahun 1976/1977 jumlah kredit yang tidak dapat macet semakin meningkat dan jumlah tunggakan tertinggi terjadi pada tahun penyaluran 1983/1984 sebesar 54,54% dari total kredit Rp. 14.081.566.000 yang disalurkan.

Tabel 1. Perkembangan Tunggakan Kredit Bimas di Indonesia

Tahun Penyaluran	Tunggakan	
	Rp (juta)	%
1970/1971	424.854	3,87
1973/1974	3.897.436	8,84
1976/1977	12.055.603	18,15
1980/1981	12.269.397	22,72
1983/1984	7.679.457	54,54

Sumber : Departemen Pertanian (dalam Pattern & Rosengart, 1991)

Kinerja program KUT tidak jauh berbeda dengan kredit Bimas. Sejak periode tahun penyaluran 1995/1996 sampai dengan 1999/2000 jumlah tunggakan semakin meningkat. Sebagai gambaran di beberapa propinsi di Indonesia seperti di Sumatera Barat, Jawa Barat dan Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk periode tersebut, terlihat jumlah tunggakan KUT semakin meningkat. Persentase tunggakan mencapai angka tertinggi pada tahun penyaluran 1999/2000, yaitu Sumatera Barat (84,99%), Jawa Barat (91,63%), dan NTB (75,90%). Kondisi tersebut terlihat tidak jauh berbeda untuk penyaluran KUT seluruh Indonesia.

## V. KESIMPULAN DAN IMPLIKASI PENELITIAN

### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan, maka diperoleh kesimpulan sesuai dengan tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Kemampuan LKI/KSM bisa bertahan dan berperan efektif melayani UTK di daerah penelitian disebabkan oleh tiga faktor penting yaitu kemampuan menyesuaikan karakteristik lembaga dengan sifat dan dinamika UTK, efektivitas pelayanan kredit, dan kemampuan memobilisasi modal internal.

Kemampuan lembaga menyesuaikan dengan sifat dan dinamika UTK menyebabkan kredit mudah diakses. Karakteristik lembaga dicirikan oleh UTK sebagai target utama pelayanan kredit, prosedur dan persyaratan administrasi relatif mudah, tidak menerapkan agunan, sistem pengembalian relatif ringan dan fleksibel, dan lokasi mudah dijangkau. Sifat UTK dicirikan oleh luas lahan terbatas, masih terdapat petani penggarap, dan usaha/tanaman bersifat musiman. Sedangkan dinamika UTK meliputi ketergantungan pada pinjaman kredit, tidak memiliki agunan, dan hanya mampu mengakses kredit yang tidak berbunga dan mudah diperoleh.

Efektivitas pelayanan kredit, disamping ditentukan oleh prosedur dan persyaratan administrasi yang mudah, sistem pengembalian yang ringan dan fleksibel, dan tidak adanya syarat agunan, juga oleh peranan pengurus dalam mengawasi penggunaan kredit dan memotivasi anggota. Hal ini menyebabkan kredit dirasakan manfaatnya oleh UTK baik kebutuhan kredit maupun peningkatan pendapatan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Acharya. M, Shrestha.B, and Seibel.H.D. 1992."Self Help Groups in Nepal", *in* Self-Help Groups as Informal Financial Intermediaries. B.R. Quinones Jr. Ed. 1992), APRACA Publications, Bangkok, Thailand.
- Anwar, Effendi, et.al. 1987."Perencanaan Pembangunan Pertanian dan Wilayah Pedesaan, IPB dan Deptan R.I.
- Aryeetey, Ernest and W.F. Steel. 1995. " Savings Collectors and Financial Intermediation in Ghana", *Savings and Development* 19 (2) : 191-211.
- Aryeetey, Ernest. 1996. "Rural Finance in Africa : Institutional Development and Access for Poor", *in* Annual World Bank Conference on Development Economics (bruno, M and Pleskovic. B, 1996) The World Bank, Washington DC.
- Araujo, Paulo F.C. and Richard L. Meyer. 1978."Agricultural Credit Policy in Brazil : Objectives and Results", *Saving and Development* 2 : 169-94.
- Adams, W. Dale and Douglas H. Graham. 1984."A Critique of Tradisional Agricultural Credit Projects and Policies", *in* Agricultural Development in the Third World (Carl K. Eicher & John M. Staatz Ed.), The Johns Hopkins University Press, Baltimore and London.
- Adiyoga, Witono dkk. 1987. "Karakteristik Kelembagaan Wilayah Pengembangan Usaha Tani Tanaman Hias, *Jurnal Hortikultural* 7 (2).
- Adiwilaga, A. 1982."Ilmu Usaha Tani, Penerbit Alumni, Bandung.
- Alexandratos, Nikos. 1995."Agricultural and Rural Poverty : Rural Finance", *World Agriculture : Towards 2010*, FAO Study, John Wiley & Sons, New York.
- Aliman, Teuku. 2004." Kebijakan Keuangan Daerah", Departemen Dalam Negeri, Jakarta.
- Akerlof, George. 1970."The Market for Lemons : Quality Uncertainty and The Market Mechanism", *Quarterly Journal of Economics* 84/3 : 488-500.
- Agustianto. "Peran Masjid Dalam Edukasi Ekonomi Syariah". <http://www.pesantrenvirtual.com/>. Dicetak Desember 2006.
- Ala. A.B. (ed). 1996." Kemiskinan dan Strategi Memerangi Kemiskinan", Liberty, Yogyakarta.
- Ali Khan, Dilawar. 1981."New Technology and Rural Transformation : A Case Study of Pakistan Punjab, *in* Rural-Urban Relations and Regional Development (Fu-Chen Lo. Ed.), Maruzen Asia, Nagoya, Japan.
- Alkaf, Hafid. 2007." Zakat dan Pemberdayaan Kaum Lemah". <http://halid.nurislam.com> (22 Mei 2007)
- Anwar E. dkk. 1993." Laporan Akhir Studi Tentang Prospek Perkreditan Koperasi Kerjasama BPPK Departemen Koperasi dengan PPs IPB Bogor.
- Ahmad, Muchtar dkk. 1991."Kelembagaan Pertanian Pertanian dan Kemiskinan di Riau", Pergepi Komisariat Riau.